

ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN BIAYA UTANG DALAM EKONOMI SYARIAH (BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2015-2018)

Anas Malik, Sinta Maralia, Agus Kurniawan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
anasmalik@gmail.com

Abstract

The effective interest rate that must be paid to creditors is often referred to as the cost of debt or the cost of debt. The right decision must be made by a manager in determining the cost of debt. if the debt is too large, it will result in an increase in interest costs which will have an impact on the soundness of the Bank. So that the implementation of corporate governance is then considered as the best management in decision making by managers and company management effectively and efficiently and in other ways to reduce the level of information asymmetry between company stakeholders. The main problem in this study is whether Good Corporate Governance (GCG) has an influence on the cost of debt in the view of Islamic economics. This study aims to determine whether the composite value on the GCG self-assessment report has an influence on the cost of debt and how Good Corporate Governance (GCG) and the cost of debt are in the perspective of Islamic economics. The value of the tcount is 1.277 and the significance value is 0.207, indicating that the results of the hypothesis test in the independent variable do not significantly affect the dependent variable on the cost of debt.

Keyword : Good Corporate Governance (GCG), Debt Costs

Abstrak

Suku bunga efektif yang harus dibayarkan kepada kreditur Sering Disebut Sebagai Biaya Utang Atau *Cost Of Debt*. Keputusan yang tepat harus dilakukan oleh seorang manager dalam menentukan biaya utang. jika utang terlalu besar akan berakibat pada kenaikan biaya bunga yang berdampak pada tingkat kesehatan Bank. Sehingga implementasi *corporate governance* kemudian dianggap sebagai manajemen terbaik dalam pengambil keputusan oleh manajer dan penegelolaan perusahaan secara efektif dan efisiensi dan disi lain untuk mengurangi tingkat asimetris informasi antar stakeholder

perusahaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah *Good Corporate Governance (GCG)* mempunyai pengaruh terhadap biaya utang dalam pandangan ekonomi syariah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai komposit pada *Self Assesment* laporan GCG mempunyai pengaruh terhadap biaya hutang dan bagaimana *Good Corporate Governance (GCG)* dan biaya hutang dalam perspektif ekonomi syariah. Nilai dari *T* hitung sebesar 1,277 dan nilai signifikansinya sebesar 0,207 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dalam variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen pada biaya utang secara signifikan

Kata Kunci : *Good Corporate Governance (GCG), Biaya Utang*

A. Pendahuluan

Perbankan mempunyai andil dalam menjalankan sektor moneter dalam kegiatan perekonomian disebuah Negara. Kekuatan Perbankan pada sektor moneter ini yang dapat membangkitkan pada sektor lainnya melalui peran Bank sebagai mediasi antara orang yang surplus dana dengan defisit dana dengan pengelolaan yang baik. Oleh karena manajemen bank sangat berpengaruh terhadap stigma nasabah untuk menginvestasikan dananya pada perbankan. Diperlukan dana yang besar dalam menjalankan kegiatan investasi dan operasional.

Keputusan penting yang dihadapi oleh seorang manajer adalah terkait dengan keputusan pendanaan. Pemilik saham memperkerjakan manajer (agent) untuk kepentingan perusahaan sehingga manajer memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Relasi antara principal dan agent akan bermasalah jika tidak mempunyai satu tujuan. Perbedaan kepentingan tersebut dikarenakan manager terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan yang dapat menyebabkan asimetris informasi.¹ kondisi terdapat informasi yang tidak seimbang antara informasi yang miliki manajer dan stakeholder disebut asimetris informasi.² Maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk dapat memberi perlindungan terhadap berbagai stakeholder perusahaan.³

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai alternatif

¹ Hamdani, *Good Corporate Governance (GCG) Tinjauan Etika dalam Praktik Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), h. 116.

² Sofia Prima Dewi, Jeffry Setiadi Chandra, 2016, "Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Asimetri Informasi, dan Manajemen Laba Terhadap *Cost of Equity Capital* Pada Perusahaan Manufaktur", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18, No. 1, h. 25-32.

³ Wibowo, E. 2010, "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*", Vol. 10, No. 2, Oktober 2010, h. 129-138.

pengelolaan perusahaan yang mendorong tinggi akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian dan kesetaraan. Menuntut keterbukaan informasi permasalahan perbankan terkait dengan operasional perbankan dapat diketahui oleh masyarakat atau investor. Maka dalam industri perbankan melalui Bank Sentral (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 terkait dengan tata kelola perusahaan yang sehat dan tangguh diperlukan adanya implementasi nilai-nilai GCG

Implementasi GCG dalam pandangan Islam menekankan pada konsep akidah (keyakinan), Hukum (Syariah) dan Moral (Akhlak).⁴ Dalam penerapan GCG secara syariah terdapat dimensi hubungan antar manusia, Tuhan, dan alam⁵

B. Landasan Teori

1. Definisi Bank

Istilah bank itu sendiri berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Istilah Bank diambil dari bahasa Prancis "Banque" dan dari bahasa Italia dengan kata "Banco" yang artinya peti, lemari atau bangku. Yang mempunyai fungsi utama adanya Bank Komersial sebagai tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. (*transaction function*).⁶

Pada tahun 90-an lahir Bank Syariah Pertama setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan UU perbankan No. 10 tahun 1998, dalam terbentuknya Perbankan yang berbasis bagi hasil.⁷ Fungsi dari Bank Syariah antara lain Memobilisasi tabungan masyarakat, Menyalurkan dana-dana pada kegiatan produktif, Fungsi regulasi dan menjaga amanah sesuai pada prinsip syariah.⁸ Dan adapun tujuan dari adanya Perbankan Syariah adalah penghapusan riba dengan bagi hasil, menghimpun dana sosial berasal dari wakaf, menerima dana dari zakat, infaq dan

⁴ Joni Emrizon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Genta Press, 2016), h. 52.

⁵ Wulandari, Anis, 2010, "Mengagas Konsep Corporate Governance dalam Konstruksi Syariah, Pamator", Volume 3, No. 1 April 2010.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3

shadaqah.

2. Konsep Teori Keagenan

Suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak antar stakeholder yakni antara pemilik dan agen sebagai pelaku utama disebut teori keagenan.⁹ Tiga asumsi yang melandasi adanya teori keagenan menurut Eisenhardt adalah Asumsi sifat manusia, Keorganisasian, dan Informasi.¹⁰ Berdasarkan asumsi diatas, dipicu adanya sifat dasar manusia seorang manajer dengan pemegang saham sehingga sering terjadi konflik agensi. Terdapat asimetris informasi antara stakeholder dalam perusahaan dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda

Dengan adanya tori agensi maka muncul konsep Good Corp[orate Governance dalam manajament bisnis perusahaan. diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para *agen*.

3. Good Corporate Governance (GCG)

a. Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (M. Arief Effendi 2009:2).¹¹ hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang dapat mendorong kinerja perusahaan berjalan secara efesiensi merupakan definisi dari Good Corporate Governance (GCG) menurut Bank Dunia. Sedangkan menurut keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2012 definisi GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan pertanggungjawaban perusahaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan undang-undang.

⁹ Jensen, Michael M., dan Meckling , William H, 1976, Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, Journal Of Financial Economics 3, h. 82.

¹⁰ Eissenhardt, Kathleen M, 1989 , Agency Theory : An Assessment and Review, Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, h. 57-74.

¹¹ M Arief Effendi, 2009. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Iplementasi. Jakarta : Salemba Empat. Gumilang, 2009.h.2

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG) Indonesia* tahun 2006 mengembangkan beberapa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*,¹² yaitu :

1) Keterbukaan (*Transparancy*)

Ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi stakeholder mengenai keuangan, manajemen dan kepemilikan perusahaan yang jelas, akurat dan tepat waktu.¹³

2) Kemandirian (*Inddependensi*)

Dalam implementasi pada GCG, korporasi harus dimanajement secara profesional dengan tidak adanya benturanantar stakeholder dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip yang sehat.¹⁴

3) Pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*)

Pertanggungjawaban yang menjamin adanya mekanisme, tanggungjawab personil manajemen yang profesional atas segala keputusan dan kebijakan yang diputuskan sehubungan dengan aktivitas perusahaan..¹⁵

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan sekitar sebagai tanggung jawab sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi penerapan GCG , perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder atas dasar asas kesetaraan dan kewajaran yang mengandung unsur keadilan, dan menjamin setiap kebijakan dalam pengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Adapun prinsip dari implementasi asas kewajaran dan kesetaraan dalam bisnis adalah:

¹² <https://www.knkg-indonesia.org> Website resmi KNKG diakses pada Rabu, 23 Oktober 2019

¹³ Wibowo, E, 2010, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, h. 129.

¹⁴ Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2012.

¹⁵ Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2012. H.131

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada Stakeholder untuk dapat memberikan masukan
- 2) Perusahaan tidak diskriminasi kepada pemangku kepentingan tertentu atas asas kewajaran dan kesetaraan
- 3) Pengukuran penerapan GCG oleh Bank menggunakan *Self Assesment* pada Bank Umum Syariah dengan peneringkatan.

3. Penilaian Mandiri (*Self Assesment*)

Peningkatan kualitas dan perbaikan pada pelaksanaan GCG, Bank diharuskan melakukan self assesment secara berkala menyeluruh terhadap kecukupan dalam pelaksanaan GCG. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang terdiri dari berbagai perkumpulan bisnis dan profesi terkemuka di Indonesia, bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *Pricewaterhouse Coopers* telah mengembangkan suatu penilaian mandiri (*Self Assesment*) sebagai alat untuk membantu menilai sejauh mana implementasi GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia.¹⁶

Dalam surat edaran Bank Indonesia No.12/13/Dpbs/2010 maka self assesment dapat dilakukan oleh BUS dan UUS. Self Assesment terdiri dari kuesioner yang diisi oleh perusahaan yang dicetak dalam booklet "Corporate Governance Self Assesment Checklist". Setiap faktor yang dinilai maka bank akan mengalikan dari setiap faktor dengan bobot yang sudah ditentukan.¹⁷

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

¹⁶ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.74

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/ 2010

Tabel 1 Bobot Faktor Self Assessment Bank Umum Syariah

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12,5 %
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17,5 %
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan komite	10 %
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10 %
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5 %
6.	Penanganan berturan kepentingan	10 %
7.	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5 %
8.	Penerapan fungsi audit intern	5 %
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5 %
10.	Batas maksimum penyaluran dana	5 %
11.	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15 %
	Total	100 %

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/ 2010

Tabel 2: Peringkat Faktor Goodcorporate Governance

Peringkat	Kekuatan	Kelemahan
1	Manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik	Kelemahan tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank
2	Manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik	Kelemahan kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank
3	Manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yang secara umum cukup baik	Kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
4	Manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik	Kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen bank
5	Manajemen bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik	Kelemahan sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen bank.

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/ 2010

Tabel 2. Nilai Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP

Berdasarkan hasil *Self Assessment* bank Victoria Syariah tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 4. hasil *Self Assessment* bank Victoria Syariah tahun 2015-2018

No	Nama Bank	2015	2016	2017	2018
1	Bank Muamalat Indonesia	3	2	3	3
2	Bank Syariah Mandiri	2	1	1	1
3	Bank Syariah Mega Indonesia	2	1,64	1,73	1
4	Bank BRI Syariah	2	1,6	1,57	1,54
5	Bank Syariah Bukopin	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Bank BNI Syariah	2	2	2	2
7	Bank Panin yariah	2	2	3	2
8	Bank BCA Syariah	1	1	1	1
9	Bank Victoria Syariah	3	3	1,62	1,56
10	Maybank Syariah Indonesia	3	3	2	2
11	Bank Aceh Syariah	2	2	3	3
12	Bank Jabar Banten Syariah	2,5	2,54	2,54	3
13	Bank Tabungan Pensiun Nasional	2	2	2	2
14	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2	2	2	2

Sumber : Data diolah 2019

4. Biaya Utang

Bunga yang harus dibayar perusahaan merupakan biaya utang, sedangkan tingkat pengembalian dari hasil yang diharapkan oleh investor untuk dapat digunakan sebagai diskonto dalam mencari nilai obligasi merupakan biaya utang

dengan menerbitkan obligasi. ¹⁸ Biaya utang sebelum pajak, besarnya biaya utang sebelum pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal atau arus kas obligasi yang dinotasikan dengan K_d . Rumus :

$$K_d = \frac{\text{Beban Utang}}{\text{Utang Jangka Panjang}}$$

Sedangkan biaya utang setelah pajak, dihitung bagi perusahaan yang menggunakan sebagian besar dananya dari utang atau terkena kewajiban membayar bunga. Dengan adanya beban bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan berkurang. Oleh karena itu, biaya modal yang dihitung juga harus setelah pajak maka biaya utang ini perlu disesuaikan dengan pajak.

Rumus :

$$K_i = K_d (1-T)$$

Keterangan :

K_i = Biaya Utang setelah

Pajak K_d = Biaya Utang

sebelum Pajak T = Tarif Pajak

C. Metode Penelitian

1. Jenis Data, Variabel, Sampel dan Populasi

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Variabel independen yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang akan di proksikan dengan penilaian *Self Assesment*. Sedangkan variable independent yang digunakan adalah Biaya Utang. biaya utang sebuah perusahaan yang terdiri dari biaya utang sebelum pajak dan biaya utang setelah pajak. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Sampel yang akan digunakan adalah Bank Umum Syariah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bank di Indonesia yang termasuk dalam golongan Bank Umum

¹⁸ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011), h. 339.

Syariah dan tidak mengalami *delisting* selama tahun 2015-2018.

- b) Laporan keuangan perusahaan disajikan secara lengkap dan dalam satuan mata uang Rupiah selama tahun 2015-2018.
- c) Bank yang memiliki saham aktif yang diperdagangkan selama tahun

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah tahun 2015-2018 berjumlah 14 Bank

Tabel 5. Populasi penelitian

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank Syariah Mandiri
3	Bank Syariah Mega Indonesia
4	Bank BRI Syariah
5	Bank Syariah Bukopin
6	Bank BNI Syariah
7	Bank Panin yariah
8	Bank BCA Syariah
9	Bank Victoria Syariah
10	Maybank Syariah Indonesia
11	Bank Aceh Syariah
12	Bank Jabar Banten Syariah
13	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Sumber data: Data publikasi Bank Indonesia dan OJK, 2018.

2. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mnguji hipotesis adalah analisis regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS (*statistical package for social science*).

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. Hal ini untuk menggambarkan variabel- variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini.

a) Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, maka perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik agar persamaan regresi yang digunakan

didalam penelitian ini valid dan bisa digunakan.

b) Pengujian Hipotesis

metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.¹⁹

D. Pembahasan

E. *Good Corporate Governance* dan Biaya Hutang

Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan kinerja. kualitas penerapan *corporate governance* didalam sebuah bank diharapkan dapat mengurangi biaya utang. Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 1,277 dan nilai signifikansinya sebesar 0,207 yang artinya variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu Biaya Utang secara signifikan. Selain itu berdasarkan hasil pengujian dan hasil uji koefisiensi determinasi *Adjusted R²* diperoleh nilai sebesar 0,011 atau 11% menyatakan bahwa terdapat pengaruh sebesar 11% antara variabel independent atau X yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap variabel Y Biaya Hutang. Sementara sisanya (100% - 11%) = 89% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pada tiap-tiap bank, diperoleh rata-rata peringkat Cukup Baik. maka Berdasarkan kualitas rating implementasi GCG yang baik tidak berpengaruh terhadap besaran hutang. yang dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan biaya hutang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio Berdasarkan hasil *Self Assessment* pada tiap-tiap bank, diperoleh rata-rata peringkat Cukup Baik.

Hal ini menyatakan bahwa Berdasarkan kualitas rating implementasi GCG yang baik tidak berpengaruh terhadap besaran hutang yang dapat

¹⁹ R. A. Fisher (1925). *Statistical Methods for Research Workers*, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, p.43.

menimbulkan peningkatan atau penurunan biaya hutang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio keuangan yang seharusnya dapat membantu pihak kreditur dalam menentukan keputusannya, menjadi cenderung diabaikan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pihak kreditur menganggap bahwa pihak manajemen dapat saja melakukan tindakan manipulasi dengan memperbesar ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pada laporan keuangan, apabila semakin besar ekuitas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan hutang yang dimiliki, maka *rasio debt equity* semakin kecil.

Hal ini juga berarti bahwa GCG sebagai mekanisme dalam menjalankan tugas dan organ perusahaan dipandang oleh investor dan kreditur belum mampu menjamin perusahaan walaupun dengan peringkat GCG yang tinggi dapat bebas dari resiko gagal bayar. Meskipun kualitas penerapan GCG baik berdasarkan peringkatnya tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari biaya hutang pada perusahaan.

F. *GCG dan Biaya Hutang Dalam Pandangan Ekonomi Syariah*

Islam sangat relevan dalam segala lini kehidupan, baik dalam segi sosial maupun ekonomi termasuk dalam pengelolaan suatu bisnis. Dalam Islam, etika merupakan acuan moral sebagai wujud *akhlakul karimah* pada praktik bisnis syariah. Tata kelola perusahaan yang mengabaikan nilai etika, akan menciptakan kekacauan dalam sebuah organisasi. Implementasi etika dipadukan kedalam *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan wujud perilaku amanah. Sehingga tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kepentingan *shareholders* namun pada pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders*. *Good Corporate Governance (GCG)* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. (H.R. Thabrani)

Dalam Al-Quran konsep *Good Corporate Governance*. Allah SWT Berfirman . “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”(QS. QS. Al-Hajj : 41)

Sala-satu aspek keunggulan implementasi GCG dalam persepektif Ekonomi Syariah yakni pertanggungjawaban manajemen adalah Kepada Allah sebagai pemilik

segalanya. Implementasi GCG harus di ikuti syariat dan moral (Etika Bisnis) sebagai pondasi keberlangsungan penerapan GCG.

Secara operasional ada dua asas dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Islam pada perbankan syariah di Indonesia yaitu asas *Shifat* dan *Tarik*.²⁰ Asas *Shifat* seperti yang dicontohkan Nabi Muhamma SAW dalam aktifitas bisnis yaitu *Shidiq, Fathonah, amanah, dan tabligh*. Sedangkan asas *Tarik* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.²¹ Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. Keduanya memiliki keterikatan satu sama lain, sebagai landasan berpijak dalam operasional bank Syariah.

Pada pelaksanaan praktik bisnis tentunya tidak terlepas dari pinjaman dana dari pihak lain atau hutang. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Karena manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya.” (QS. QS Al-Maidah ayat 2)

Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong- menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam menjalankan amanahnya termasuk dalam pengelolaan hutang, perusahaan perbankan harus dapat sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melakukan perbuatan kecurangan agar dapat tercipta iklim ekonomi yang kondusif tanpa menyebabkan adanya kerugian bagi pihak lain karena dalam

²⁰ Hamdani, *Good Corporate Governance (GCG) Tinjauan Etika dalam Praktik Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), h. 208.

²¹ Novi Widiyanti Wulandari., *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*. (Universitas Jember : 2009). H.104

menjalankan bisnis islam memiliki tiga dimensi hubungan manusia, Tuhan dan alam. Maka, tanggung jawabnya pun bukan hanya kepada manusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap Tuhan.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis , Nilai dari T_{hitung} sebesar 1,277 dan nilai signifikansinya sebesar 0,207 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dalam variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen pada biaya utang secara signifikan. Hasil dari penelitian ini pengukuran Good Corporate Governance (GCG) menggunakan rating dari self Assesment disetiap bank Umum Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Artinya implementasi dan kualitas Good Corporate yang baik didasarkan atas rating tidak berpengaruh terhadap besaran hutang yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan yang dapat berdampak pada peningkatan atau penurunan biaya hutang. Nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam transaksi hutang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Output dari adanya hutang membantu dalam kebaikan. Hasil *Self Assesment* pada tiap-tiap Bank syariah memperoleh peringkat Cukup Baik. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan oleh Bank Syariah ternyata selaras dengan ajaran-ajaran islam dan relevan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Eissenhardt, Kathleen M, 1989 , *Agency Theory : An Assessment and Review*, *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, h. 57-74.
- Hamdani, *Good Corporate Governance (GCG) Tinjauan Etika dalam Praktik Ekonomi dan Bisnis*,(Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016)
- <https://www.knkg-indonesia.org> Website resmi KNKG diakses pada Rabu, 23 Oktober 2019
- Jensen, Michael M., dan Meckling , , *Theory of The Firm : Managerial* (William H, 1976)
- Joni Emrizon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Genta Pres. 2016)
- M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006),
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2011)
- Novi Widiyanti Wulandari., *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*. (Universitas Jember : 2009)
- Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2012.
- R. A. Fisher (1925). *Statistical Methods for Research Workers*, (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925)
- Sofia Prima Dewi, Jeffry Setiadi Chandra, 2016, "Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Asimetri Informasi, dan Manajemen Laba Terhadap *Cost of Equity Capital* Pada Perusahaan Manufaktur", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18, No. 1, h. 25-32.
- Suharso, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV.Widya Karya)
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/ 2010
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan.
- Wibowo, E, Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, 2010
- Wulandari, Anis, 2010, "Menggagas Konsep Corporate Governance dalam Konstruksi 2000)